



Pembelajaran bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membina semangat nasionalisme mahasiswa STKIP PGRI Kota Sukabumi

Tina Septiana¹

¹ Pendidikan Kewarganegaraan STKIP PGRI Kota Sukabumi, Sukabumi

ABSTRAK

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perkuliahan perguruan tinggi dapat mengembangkan semangat dan motivasi bela negara pada mahasiswa. Data dalam penelitian ini dihimpun dari data hasil wawancara mahasiswa serta kajian analisis kritis terhadap berbagai literatur. Adapun studi wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang memiliki kepedulian, perhatian dan kompetensi spesifik mengenai pemahaman dan argumen dalam mengkaji dan menganalisa bidang bela negara yang tertera dalam perkuliahan PKn di perguruan tinggi. Adapun kajian pustaka yang dijadikan referensi adalah berbagai literatur (bahan bacaan) baik media cetak maupun media elektronik yang memiliki relevansi dengan upaya mengembangkan semangat nasionalisme dan bela negara. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dipahami bahwa secara konsepsi dan konstruksi Pembelajaran bela negara dalam pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya untuk mengembangkan semangat nasionalisme pada mahasiswa STKIP PGRI Kota Sukabumi. Hal tersebut tidak lepas dari fokus kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan pada hakikatnya menitikberatkan pembangunan kesadaran sebagai negara kesatuan republik Inonesia dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air (*nasionalisme*).

Sejarah Artikel

Diterima : 27 Mei 2020

Disetujui : 1 September 2020

Kata kunci:

bela negara, nasionalisme, pendidikan kewarganegaraan

Pendahuluan

Isu mengenai keutuhan dan kedaulatan negara sebagai bentuk ketahanan nasional di bidang pertahanan merupakan wacana sentral yang menjadi kajian strategis di setiap negara secara total dan semesta. Eksistensi suatu negara menjadi harga mahal yang harus dipertahankan sebagai bentuk penghargaan atas lahirnya suatu negara, terlebih ketika lahirnya suatu negara diperoleh melalui jalan panjang dengan perjuangan pahit yang tidak pelak harus mengorbankan jiwa dan raga sebagai taruhannya. Sehingga, sangat beralasan apabila berbagai langkah ditempuh demi keutuhan dan kedaulatan suatu negara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meraih kemerdekaan dengan derap langkah panjang yang tidak mudah. Kehidupan di bawah kaki kolonial yang berlangsung selama berabad-abad telah mencipta kesengsaraan yang teramat menyiksa bagi seluruh bangsa Indonesia. Berbagai perlawanan pun dilakukan sebagai upaya untuk lepas dari belenggu kolonial, baik secara kedaerahan maupun melalui sistem kerja bersama dalam kesatuan bangsa Indonesia. Alhasil, walaupun harus dengan kucuran peluh keringat dan

tumpahan darah serta jiwa raga yang tidak ragu untuk dikorbankan untuk sebuah kemerdekaan, dengan bangga bangsa Indonesia dapat merasakan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang diperoleh atas usaha tangan sendiri dan berkat kasih sayang Allah yang Maha Kuasa, bukan kemerdekaan yang diberikan cumah-cumah oleh sang penindas.

Begitu getirnya perjuangan dalam meraih kemerdekaan, menjadikan keutuhan dan kedaulatan sebagai kondisi yang harus selalu dijaga dan dilestarikan sebagai wujud nyata dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Berbagai langkah strategis ditempuh sebagai bentuk pertahanan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Salah satu langkah yang dimaksud adalah upaya bela negara. Menurut Winarno, "Bela negara adalah upaya setiap warga negara Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri" (2009: 182). Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa upaya bela negara merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, bahkan juga sebagai hak yang harus ditunaikan warga terhadap negara. Hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme) yang harus selalu ditumbuhkembangkan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa "Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara". Oleh sebab itu, setiap warga negara wajib turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing sebagai perwujudan dari cinta tanah air (*nasionalisme*) sebagai warga negara.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara jelas ditegaskan dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa:

Ayat (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: (a) pendidikan kewarganegaraan, (b) pelatihan dasar kemiliteran wajib, c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan (d) pengabdian sesuai profesi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keikutsertaan bela negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan juga masyarakat sipil, tidak hanya oleh golongan tua melainkan juga para pemuda, tidak hanya oleh laki-laki, melainkan juga perempuan. Karena, seperti yang sudah dijelaskan bahwa upaya bela negara tidak hanya upaya memanggul senjata, melainkan bisa ditampilkan dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi atau menampilkan sikap dan perilaku positif sesuai profesi masing-masing.

Generasi muda merupakan modal sosial (*social capital*) negara yang diharapkan dapat memainkan peran strategis agar dapat mendukung terciptanya kehidupan bangsa dan negara yang tentram dengan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai semangat dasar dalam mewujudkan keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara. Namun, kondisi yang ada dewasa ini begitu memperhatikan yang justru datang dari para pemuda, tidak sedikit pemuda yang mengabaikan hak dan kewajiban bela negara. Seperti halnya penelitian yang

dilakukan oleh Fauzie (Suabuana, 2010) yang mana mahasiswa di Bandung sebagai respondennya. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa '60% responden merasa tidak bangga sebagai bangsa Indonesia; 24,3% merasa bangga; 3,1% menjawab tidak tahu; dan 12,6% merasa biasa saja'. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai tindakan *disorder* yang ditampilkan pemuda, seperti fenomena tawuran antarpemuda yang kian marak terjadi, tindakan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak diri, serta kecenderungan hidup individualistis sebagai akibat buruk globalisasi dan modernisasi yang tidak disikapi secara cerdas. Seperti halnya data yang dilansir dari *palembang.tribunnews.com* (2010) bahwa "Para pengguna narkoba dan bahan/obat berbahaya di Sumatera Selatan cenderung makin meluas dan kebanyakan adalah kalangan remaja".

Berbagai fenomena tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suseno, F.M. (2010) mengenai nasionalisme Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa:

Terdapat dua ancaman yang mencuat dari situasi tidak memuaskan di negara kita bahwa pemuda Indonesia larut dalam *budaya hedonis konsumerisme* dengan menyerah menarik diri dari kehidupan bangsa, alias golput, dan yang kedua bahwa mereka mengisi kekosongan cita-cita bangsa dengan *ajaran-ajaran radikal-ekstremis*.

Ajaran-ajaran *radikal-ekstrem* yang dimaksudkan adalah fanatisme berlebihan pada suatu pandangan yang telah mengakar kuat dalam diri. Sikap fanatik ini bisa berupa sifat *etnisitas* maupun *primordialisme* dalam takaran yang berlebih. Sehingga, sering menimbulkan akibat yang ekstrim juga diujungnya, misalnya tawuran antarsuporter sepakbola yang kerap memakan tumbal jatuhnya korban jiwa. Tidak cukup hanya disitu, tawuran antar pelajar yang semakin marak terjadi dewasa ini seperti sudah menjadi borok nasional, tidak hanya terjadi disatu atau dua daerah tertentu saja, melainkan pada sejumlah daerah di Indonesia.

Kecenderungan tindakan negatif yang ditampilkan sebagian para pemuda tersebut mengindikasikan bahwa mereka telah mengabaikan kewajiban untuk turut serta dalam bela negara, karena sikap dan tindakan yang ditampilkan para pemuda tidak mencerminkan posisi atau peran mereka sebagai pemuda. Kondisi ini begitu tumbuh subur disebabkan karena kurangnya kesadaran, yaitu kesadaran diri sebagai bangsa dan negara Indonesia yang cerdas dan baik serta harus senantiasa menjunjung nilai-nilai nasionalisme, yang berimbas pada keengganan untuk ikut serta dalam upaya bela negara.

Berbagai tindakan strategis yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkembangkan kesadaran bagi warga negara. Salah satu tindakan tersebut dilakukan melalui peran pendidikan. Jalur pendidikan merupakan langkah formal yang ditetapkan pemerintah dengan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan kurikulum yang telah ditetapkan. Dalam tataran praktis, pendidikan diselenggarakan dalam berbagai tingkatan satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk mentransformasikan nilai-nilai (*value transform*) sosial kultural bangsa Indonesia dengan landasan filosofis keilmuan yang sistematis dan terarah. Berbagai disiplin ilmu dalam bentuk mata pelajaran dikembangkan dalam satuan pendidikan sebagai langkah konkret untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut, yang pada muaranya bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Sesuai amanat Pasal 9 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan program pendidikan yang dikembangkan pada satuan pendidikan tinggi yang merupakan salah satu sarana keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara non-fisik yang dapat meningkatkan kesadaran kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) bahwa "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai PKn dalam kaitannya dengan semangat bela negara mahasiswa di perguruan tinggi. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana konsepsi dan konstruksi PKn sehingga dapat mengembangkan semangat bela negara mahasiswa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, artinya peneliti melakukan analisis untuk mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan studi literatur. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai konsepsi dan konstruksi PKn dalam pembelajaran bela negara yang di perkuat dengan data-data yang diperoleh dari analisis berbagai literatur yang relevan dengan kajian bela negara sebagai wujud nasionalisme.

Informan dalam wawancara yang dilakukan ditentukan oleh peneliti dengan kriteria yaitu pihak-pihak yang memiliki perhatian dan kompetensi di bidang PKn dalam kaitannya dengan pembelajaran bela negara, dalam hal penelitian ini informannya adalah Prof. Dr. H. Astim Riyanto, SH., MH., Dr. Encep Syafief Nurdin, M.Pd., M.Si., dan Muhamad Iqbal, S.Pd., M.Si.,. Adapun studi literatur yang dilakukan adalah kajian terhadap literatur baik literatur cetak maupun *electronic literataure*, seperti artikel dan tulisan-tulisan yang dikutip dari internet.

Hasil dan Pembahasan

PKn di perguruan tinggi merupakan bagian dari kurikulum inti yang dikembangkan kurikulum pendidikan formal di perguruan tinggi dengan tujuan membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sebagai upaya untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan yang utuh sebagai manusia Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yakni sebagai manusia Indonesia yang religius, berkemanusiaan dan berkeadaban, yang memiliki nasionalisme, yang cerdas, yang berkerakyatan dan yang adil terhadap lingkungan sosialnya. Adapun esensi PKn diarahkan sebagai pendidikan demokrasi untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab serta sekaligus dalam upaya untuk menjadikan warga negara yang baik dan cerdas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Prof. Dr. H. Astim Riyanto, SH., MH., dapat diketahui bahwa PKn memiliki peranan yang penting dalam membentuk tata laku mahasiswa dalam upaya bela negara, karena menurut beliau pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk keikutsertaan bela negara warga negara yang lebih menekankan pada kesadaran sebagai warga negara Indonesia". Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Dr. Encep Syafief Nurdin, M.Pd., M.Si bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang dilakukan sebagai keikutsertaan bela negara dengan menitikberatkan pada pembinaan mental dan kesadaran kepada mahasiswa sebagai warga negara, dengan kata lain, pembelaan negara melalui PKn merupakan bela negara dalam wujud nonfisik dengan penanaman kesadaran sebagai fokus sentralnya.

Berdasarkan uraian mengenai PKn tersebut dapat dipahami bahwa, secara non-fisik PKn merupakan salah satu langkah keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. PKn efektif untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga warga negara memiliki pemahaman dan penghayatan yang tinggi akan pentingnya keikutsertaan dalam upaya bela negara dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan PKn memiliki tujuan yang strategis dalam hubungannya dengan bela negara.

Keputusan DIRJEN DIKTI No.43/DIKTI/Kep/2006 (Kaelan & Zubaedi, A., 2007:2) mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dirumuskan dalam visi dan misi sebagai berikut:

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadilan, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya; dan *Misi* Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Adapun mengenai tujuan PKn dalam membentuk warga negara yang patriotik dan nasionalisme diungkapkan oleh Somantri, M.N (2001:279). Menuurutnya "Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis..., Pancasila sejati". Patriotik yang dimaksud disini adalah jiwa kepahlawanan yang mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Adapun kesetiaan terhadap bangsa dan negara merupakan suasana kebatinan yang akan membawa seorang warga negara pada keberanian dan kerelaan untuk berbuat dan melakukan segala sesuatu demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya adalah menampilkan upaya bela negara. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wahab & Sapriya, (2011:346) mengemukakan "Tujuan PKn yaitu untuk mengembangkan partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dan warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi

konsitusional Indonesia". Lebih lanjut dijelaskan, mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Pusat Kajian Kurikulum (Abdulkarim, TT) mendefinisikan:

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Mengenai hak dan kewajiban tersebut, Dr. Encep Syarief, M.Pd., M.Si, mengungkapkan bahwa:

Hak dan kewajiban bela negara dapat dikaji dari dua sisi, yaitu: *Pertama*, dari eksistensi manusia sebagai warga negara, bahwa kebutuhan akan rasa aman merupakan hak setiap warga negara oleh sebab itu bela negara merupakan hal yang penting untuk menjamin rasa keamanan. *Kedua*, dilihat dari eksistensi sebuah negara, bahwa bela negara merupakan kewajiban bagi semua warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara sebagai bentuk kehormatan sebagai warga negara dan juga sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bela negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara, karena tidak hanya sebagai hak, melainkan juga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, tidak hanya sebagai hak, melainkan sebagai bentuk penghormatan yang diberikan negara kepada setiap warga negara tak terkecuali juga bagi para mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian dari agen perubahan sosial (*social exchange agent*) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam membantu mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara yang memiliki ketahanan nasional dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang ideologi, politik, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan yang berbasis pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal tersebut tidak lepas dari posisi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan rasionalisasi logis berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan.

Selain dari konsepsi mengenai tujuan tersebut, PKn dapat mengemabangkan semangat bela negara mahasiswa dapat dikaji berdasarkan kompetensi yang dikembangkan dalam PKn itu sendiri. Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No.43/DIKTI/Kep/2006 (Kaelan & Zubaedi, 2007: 2) dijelaskan bahwa:

Kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Adapun menurut Branson (Budimansyah & Suryadi, 2008:55), "kompetensi warga negara yang dikembangkan dalam PKn adalah Pengetahuan Warga Negara (*Civic Knowledge*), Kemampuan Warga Negara (*Civic Skill*), Kemampuan Warga Negara (*Civic Disposition*)". *Civic Knowledge* merupakan pengetahuan kewarganegaraan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam lingkup negara

nasional maupun dalam level internasional atau hubungan dengan negara-negara lain di era global. Mengenai pengetahuan kewarganegaraan ini Budimansyah dan Suryadi (2008: 55) mengungkapkan bahwa:

Terdapat lima pertanyaan penting yang secara terus menerus harus diajukan sebagai sumber belajar pendidikan kewarganegaraan. Lima pertanyaan yang dimaksud adalah: (1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan? (2) Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia? (3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstistusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia? (4) Bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia? dan (5) Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia.

Civic Skill (keterampilan warga negara) merupakan kecakapan intelektual dan partisipatori yang relevan (Budimansyah & Suryadi, 2008:58). *Civic Skill* mempunyai kaitan erat dengan *Civic Knowledge*. Warga negara dapat menunjukkan keterlibatannya dalam pemilihan umum tentunya setelah ia mengetahui makna pemilihan umum, atau paling tidak tahu untuk apa pemilu yang diadakan di sekitar tempat tinggalnya. Kemampuan menyikapi secara bijaksana terhadap dampak positif dan negatif dari globalisasi tentunya diawali dengan pengetahuan mengenai hakikat globalisasi itu sendiri. Kemampuan menganalisis berbagai permasalahan-permasalahan sosial politik yang berkembang di suatu negara tentunya dapat dilakukan jika mengetahui akar permasalahan-permasalahan tersebut.

Adapun *Civic Disposition* merujuk kepada sikap atau watak baik yang mutlak dibutuhkan oleh setiap warga negara dalam menjaga dan menempatkan diri baik sebagai makhluk individu, terlebih sebagai makhluk sosial. Watak yang baik dari warga negara akan sangat menentukan bagaimanakah ia berada dalam komunitas atau lingkungannya, dapatkah ia diterima baik oleh masyarakat atau tidak. Selanjutnya, dalam pergaulan internasional sebagai masyarakat dunia watak warga negara ini menjadi norma wajib yang harus dimiliki agar warga negara dapat mempertahankan identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa ditengah arus sistem politik internasional dan gemerlapnya kemegahan di era teknologi mutakhir yang mengalir kian deras ke berbagai lini kehidupan nasional.

Mengenai pentingnya kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan watak warga negara tersebut, Sulkipani (Sapriya, 2013) menjelaskan bahwa:

Knowledge, skills and strong disposition of nationality from each individual absolutely necessary as a bulwark that will help them to treats well any effects of globalization in addressing any challenges in the global era. The citizenship knowledge in question is the knowledge of how the relationship between Indonesia and other countries in the international life which closely related to the process of globalization, citizenship ability means a skills which possessed by every citizen in attempt to see the progress in the global era. And disposition of the citizen represents the owned character which based on the foundation of the constitutional and idiil nation are Pancasila and the UUD NRI 1945.

Pendapat tersebut menegaskan bahwa pengetahuan, kecakapan, dan watak warga negara yang kuat dari setiap individu mutlak diperlukan sebagai benteng yang akan membantu mendewasakan diri dalam menyikapi setiap tantangan di era global. Dengan kata lain, baik pengetahuan, sikap, dan watak merupakan kompetensi yang sangat

dibutuhkan bagi setiap individu warga negara dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan di era modern.

Berdasarkan konsepsi PKn yang dijelaskan tersebut, dapat dipahami bahwa PKn merupakan program pembelajaran sebagai wahana yang tepat untuk menumbuhkembangkan kesadaran bela negara bagi warga negara sebagai bentuk kecintaan (*nasionalisme*) terhadap bangsa dan negara. Berbagai kompetensi yang dikembangkan dalam PKn tersebut merupakan bekal wajib yang harus dimiliki oleh peserta didik agar dapat menampilkan partisipasi aktif sebagai warga negara dengan dilandasi oleh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (*nasionalisme*) baik dalam kehidupan sehari-hari pada lingkup masyarakat yang lebih kecil, maupun dalam aspek kehidupan yang lebih luas pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengenai konstruksi dalam PKn, berdasarkan analisis berbagai sumber dapat diketahui bahwa konstruksi Pkn terdiri dari beberapa komponen yang dikembangkan untuk diimplementasikan sebagai pembelajaran. Berikut komponen-komponen pembelajaran PKn, yaitu: Pendekatan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, metode Pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (Permana, D.S., 2010).

Pendekatan pembelajaran dalam PKn merupakan komponen yang sangat penting untuk dibangun dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam lingkup perguruan tinggi, Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si, mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran PKn lebih mengarah pada prinsip *andragogi*, artinya partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran merupakan kondisi yang harus senantiasa terbangun. Lebih lanjut, menurutnya pembelajaran PKn harus mampu melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam menganalisis dan mengkaji berbagai isu sosial kewarganegaraan, terlebih dalam pembelajaran bela negara, oleh sebab itu, pendekatan yang tepat adalah pendekatan yang berorientasi pada peserta didik (*students centered learning*). Beliau menambahkan, dalam pendekatan ini pendidik/dosen bukan berarti bebas tugas, tugas dosen adalah sebagai fasilitator dan rekan belajar yang mengarahkan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga, dengan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik, pembelajaran akan berlangsung dalam atmosfer yang dinamis, inovatif, dan kreatif. Dalam pembelajaran PKn, dosen harus senantiasa melakukan berbagai inovasi, karena pada dasarnya PKn merupakan mata kuliah yang berkaitan erat dengan berbagai kondisi dinamis dalam kehidupan suatu negara, misalnya, masalah pemerintahan, kasus hukum, sosial, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan pendapat mengenai pendekatan pembelajaran PKn tersebut, Wahab & Sapriya (2011:333) mengungkapkan bahwa salah satu tindakan inovasi dalam pendekatan pembelajaran PKn adalah:

Pergeseran penerapan pendekatan pembelajaran dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan isi (*content based curriculum*) ke arah yang lebih menekankan pada proses (*process based curriculum*) bahkan sekarang telah bergeser pada orientasi yang menekankan pada kompetensi (*competency based curriculum*).

Inovasi dalam pendekatan tersebut merupakan gagasan yang dimaksudkan dengan tujuan agar PKn dapat membentuk warga negara yang cerdas dan mandiri dalam memahami serta menemukan pemecahan permasalahan yang senantiasa ada dan berkembang dalam dinamika hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik (*students centered learning*) lebih memungkinkan pada pengembangan kompetensi peserta didik, karena pada orientasi ini peserta didik memiliki kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi kemampuan diri dan mampu memahami berbagai kajian dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, penekanan pada proses dan kompetensi sangat penting untuk dikembangkan, mengingat keterampilan warga negara dalam memahami dan pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan perlu pembiasaan secara terus menerus. Lebih lanjut, mengenai pendekatan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran PKn juga meliputi berbagai inovasi yang mencakup dalam materi, sumber, dan metode pembelajaran. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Tunner dkk (Wahab & Sapriya., 2011:336) bahwa pendekatan pembelajaran PKn meliputi beberapa hal, yaitu:

Pendekatan sumber belajar audiovisual (*audiovisual materials*); pendekatan studi kasus (*case studies*); pendekatan nara sumber (*community resource person*); pendekatan pembelajaran kelompok (*cooperative learning*); pendekatan debat (*debates*); pendekatan pemungutan suara, wawancara, dan survei (*polls, interviews, and surveys*); pengadilan tiruan (*mock trials*), pendekatan bermain peran dan simulasi (*role plays and simulations*); pendekatan menulis surat kepada pejabat publik (*writing letters to public officials*).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa inovasi dalam komponen pendekatan pembelajaran PKn harus dilakukan dalam berbagai ruang lingkup yang berkaitan dengan pembelajaran PKn itu sendiri, baik dari segi orientasi, sumber, materi, maupun dalam metode pembelajaran. Sehingga PKn diharapkan dapat memainkan peran yang maksimal dalam mengarahkan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

Mengenai materi pembelajaran, dapat dipahami bahwa materi pembelajaran merupakan isi atau informasi yang berisikan konsep pengetahuan yang akan dibahas dalam pembelajaran. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Djamarah & Zain (2002) bahwa Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan oleh pendidik (guru/dosen) dalam proses atau aktivitas pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan bagian dari komponen pembelajaran PKn yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, agar materi yang akan disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka penyusunan materi pun harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat dengan menggunakan sumber yang relevan dengan rambu-rambu atau kurikulum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) No. 43/Dikti/2006 (Kaelan & Zubaedi, 2007:4) tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi khususnya untuk bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan diketahui bahwa yang menjadi bahan kajian untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan meliputi kajian-kajian berikut, yaitu: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Negara dan

Konstitusional, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*, Geopolitik Indonesia, dan Geostartegik Indonesia.

Dalam proses pembelajaran guru memerlukan berbagai cara atau pola tertentu untuk mengaktualisasikan materi-materi tersebut dalam pembelajaran, Sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik, hal ini dikenal dengan istilah metode pembelajaran. Menurut Wesley, E.B & Wronski, S.P., (Wahab, 2007: 83) “Metode mengajar adalah kata yang digunakan untuk menandai serangkaian kegiatan yang diarahkan oleh guru yang hasilnya adalah belajar”. Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa metode pembelajaran serangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru.

Menurut Muhamad Iqbal, S.Pd., M.Si., metode yang diterapkan dalam pembelajaran PKn harus dilakukan dengan bentuk dan sistem yang vartiatif dan inovatif, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pembelajaran dapat berlangsung dalam kondisi yang kreatif dan inovatif, sehingga kejenuhan dalam pembelajaran dapat dihindari. Tentunya metode yang diterapkan harus memperhatikan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Bertitik tolak dari karakteristik dan tujuan PKn, maka metode pembelajaran PKn yang membawa misi pendidikan demokrasi, pembangunan karakter pendidikan nilai agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas, perlu mengakomodasi langkah-langkah berpikir ilmiah, yaitu: ‘*A feeling of perplexity, The definition of the problem, Suggesting and testing hypothesis, development of the solution by reasoning, and Testing of the conclusion followed by reconsideration if necesarry*’ (Dawy, J., dalam Wahab, 2011: 344). Lebih lanjut Banks (Wahab, 2011:344) Mengemukakan bahwa:

Langkah-langkah berpikir ilmiah menjadi metode inkuiri sosial yang digunakan untuk menghasilkan fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang terdiri dari tujuh langkah, yaitu: perumusan masalah, perumusan hipotesis, definisi istilah, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, menguji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori, memulai inkuiri lagi.

Salah satu metode pembelajaran PKn yang dikembangkan dari metode inkuiri (*Reflective Inquiry*) adalah “Metode portofolio atau yang dikenal dengan istilah *Project Citizen*” (Budimansyah, D., 2010:153). Mengenai tujuan metode portofolio Wahab & Sapriya (2011: 345-346) mengemukakan bahwa:

Metode portofolio merupakan metode pembelajaran untuk pembentukan warga negara demokratis, yakni cara membelajarkan anak didik dengan mengembangkan kecerdsan warga negara (*civic intelegence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mengembangkan anak didik sebagai warga negara (*civic participation*) guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik.

Adapun langkah-langkah dalam metode pembelajaran portofolio atau project citizen terdiri dari enam langkah, yaitu “Mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk bahan kajian kelas, mengumpulkan informasi, mengembangkan portofolio kelas, menyajikan portofolio, dan merefleksikan pengalaman belajar” (Budimansyah, D., 2010:163-210). Penerapan berbagai metode dalam pembelajaran harus dibarengi dengan kemampuan

guru dalam memahami dan mengimplementasikan metode tersebut. Karena, bisa saja metode yang akan diterapkan secara konseptual baik dan menarik untuk diterapkan, namun ketika pemahaman dan penguasaan guru terhadap cara kerja dari metode yang akan diterapkan minim, maka metode yang akan diterapkan pun tidak akan mengarah pada pencapaian hasil yang baik. Oleh sebab itu, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan aktif, kreatif, dan inovatif, maka mutlak guru harus memahami konsep metode pembelajaran yang akan diterapkan.

Dalam implementasi pembelajaran, media pembelajaran juga merupakan komponen penting yang tidak boleh diabaikan. Berbagai media telah banyak dikembangkan untuk digunakan dalam pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran yang berlangsung dapat memacu memotivasi siswa untuk belajar sehingga rasa ingin tahu siswa semakin besar. Pembelajaran dengan metode atau strategi yang kreatif pun tentunya tidak akan berlangsung maksimal jika tidak dilengkapi dengan media pembelajaran. Karena, sangat besar kemungkinannya pembelajaran yang berlangsung akan berjalan pada situasi yang juga menjenuhkan. Terlebih ketika materi yang akan disampaikan cukup luas, sementara tidak menggunakan media pembelajaran atau media yang digunakan tidak tepat, sehingga pembelajaran pun begitu melelahkan bagi guru.

Penggunaan media pembelajaran juga harus rancang dan dipertimbangkan sesuai dengan prinsip kesesuaian dan keterlaksanaan. Artinya, media yang digunakan harus sesuai atau relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian, media pembelajaran yang akan digunakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi di mana pembelajaran berlangsung. Sebagus apapun media pembelajaran jika tidak relevan dengan tujuan dan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi lapangan yang tidak mendukung, maka pembelajaran yang berlangsung sama halnya dengan tidak menggunakan media.

Jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam setiap proses pembelajaran, termasuk pembelajaran PKn adalah sebagai berikut:

1. Media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, dan piringan hitam;
2. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti foto, gambar, lukisan, dan sebagainya, ada pula media visual yang menampilkan gambar bergerak seperti film bisu film kartun;
3. Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua (Djamarah & Zain, 2002).

Berdasarkan klasifikasi media pembelajaran tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Dengan beragamnya jenis media pembelajaran tersebut, diharapkan guru dapat menggunakan media pembelajaran yang variatif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sehingga, pembelajaran yang berlangsung akan menjadi kegiatan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan.

Mengenai sumber pembelajaran, melalui kajian dari berbagai literatur dapat dipahami bahwa guru yang cerdas adalah guru yang mampu memaksimalkan berbagai kondisi yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Kompetensi guru dalam merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran begitu diperlukan dalam membentuk siswa menjadi siswa yang memiliki kecerdasan multidimensi. Salah satu komponen pembelajaran yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan adalah penggunaan sumber belajar. 'Sumber belajar merupakan sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat terdapatnya materi pembelajaran atau asal untuk belajar seseorang' (Winataputra dalam Permana, 2010).

Sama halnya dengan metode dan media, penggunaan sumber pembelajaran juga harus direncanakan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi yang ada di kelas. Penggunaan sumber belajar yang tepat akan membantu siswa dalam memahami dan menguasai berbagai kompetensi yang diharapkan. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pembelajaran merupakan proses dinamis yang terus berkembang, terlebih pembelajaran ilmu sosial yang akan terus bergerak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Oleh sebab itu, sejatinya pembelajaran juga harus diimbangi dengan inovasi atau pembaruan agar pembelajaran yang berlangsung tidak terjebak dalam pembelajaran yang monoton dan atau tertinggal dari kondisi masyarakat yang berkembang.

Berkaitan dengan hal tersebut, sumber pembelajaran yang akan digunakan perlu memperhatikan prinsip relevansi dengan pencapaian tujuan dan penggunaannya perlu divariasikan pada beragam sumber belajar. Winataputra (Permana, D.S., 2010) berpendapat bahwa 'Setidaknya terdapat lima sumber belajar, yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, lingkungan sejarah dan lingkungan masyarakat), dan media pendidikan'.

Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa kekeliruan yang sangat besar jika pembelajaran yang digunakan hanya berfokus pada satu sumber belajar saja, apalagi ketika pembelajaran yang dilaksanakan tidak menggunakan sumber belajar yang jelas. Karena, terdapat beberapa sumber belajar yang variatif yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan kondisi pembelajaran dan kondisi lingkungan yang ada.

Komponen dalam pembelajaran PKn yang juga harus dipahami dan dikuasai oleh pengajar/dosen adalah evaluasi. Berdasarkan analisis terhadap literatur, dapat dipahami bahwa evaluasi atau penilaian dapat artikan sebagai upaya menghimpun hasil belajar siswa. Adapun penilaian pembelajaran PKn adalah "proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik dalam mata pelajaran PKn" (Wahab & Sapriya., 2011: 351). Penilaian yang dilakukan merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap berbagai kompetensi siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran PKn, penilaian yang dilakukan tidak hanya penilain kognitif, melainkan pada domain pendidikan yang lain, yaitu afektif dan psikomotorik. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah guru sering terjebak dalam penilaian kognitif yang parsial, artinya tidak menyeluruh pada berbagai kompetensi siswa. Pada hakikatnya PKn merupakan pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai (*value oriented learning*). Oleh sebab itu, penilain yang dilakukan pun harus sesuai dengan esensi pembelajaran PKn tersebut.

Sejatinya, penilaian harus berbasis pada prinsip-prinsip yang mengarahkan pada penilaian yang objektif, sehingga diperoleh penilaian yang benar-benar merupakan hasil dari pengukuran terhadap kinerja dan prestasi siswa. "Dalam penilaian terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh

dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel” (Wahab, A.A & Sapriya., 2011: 354-355).

Dalam pembelajaran PKn beragam teknik penilaian juga diharapkan dapat dilakukan guru agar penilaian yang dilakukan dapat mengukur ketiga domain pendidikan. menurut Wahab & Sapriya (2011:356) “Teknik penilaian yang dapat dilakukan pendidikan mata pelajaran PKn dan kepribadian antara lain: tes tertulis, observasi, penugasan, tes lisan, penilaian portofolio, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antarteman”. Dengan demikian, diharapkan para guru dapat menentukan teknik penilaian yang tepat sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Sehingga, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dapat dinilai dengan sistem penilaian yang tepat.

Berdasarkan konstruksi yang dikembangkan dalam PKn tersebut dapat dipahami bahwa PKn dapat menjadi wahana untuk mengembangkan semangat bela negara mahasiswa. Karena materi atau kajian yang dikembangkan dalam PKn merupakan materi yang berkaitan dengan pemahaman dan penanaman kesadaran kebangsaan dan rasa cinta tanah air (*nasionalisme*). Kemudian adanya inovasi dalam pendekatan, metode, dan sumber lebih menekankan pada proses dengan melibatkan partisipasi aktif peserta didik (*students centered learning*) serta evaluasi pembelajaran pada proses dan hasil akan lebih memberikan kemungkinan yang besar bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai potensi yang ada dalam diri, sehingga peserta didik tidak hanya mampu menguasai materi kognitif, melainkan mampu mengaplikasikan materi yang dipelajari dalam praktik kehidupan dengan dasar afektif yang unggul.

Simpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan mengenai konsepsi dan konstruksi yang dikembangkan dalam PKn tersebut dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan wahana yang tepat untuk mengembangkan semangat bela negara mahasiswa. Karena, baik dari segi konsepsi maupun konstruksi yang dikembangkan dalam PKn secara teoritis memuat tujuan, kompetensi, dan materi atau kajian yang lebih menitikberatkan pada upaya menanamkan kesadaran diri dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang diharapkan dapat membantu memantapkan jati diri mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa *nasionalisme* yang tinggi. Sehingga, mahasiswa akan memiliki penghayatan yang kuat mengenai upaya bela negara, bahwa upaya bela negara tidak hanya sebagai hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, melainkan sebagai bentuk kehormatan sebagai warga negara.

Kemudian, adanya inovasi yang dikembangkan dalam konstruksis PKn yang meliputi: pendekatan, materi, metode, sumber, dan evaluasi akan memotivasi mahasiswa untuk senantiasa mengeksplorasi berbagai potensi dan keunggulan diri. Sehingga, pemahaman mahasiswa terhadap materi PKn tidak hanya sebatas pada penguasaan kognitif, melainkan mampu untuk mengaktualisasikan materi tersebut dalam berbagai tindakan atau sikap positif yang mencerminkan upaya bela negara sebagai wujud cinta tanah air.

Referensi

- Abdulkarim, A. (T.T). *Rangkuman Materi Perkuliahan Bidang Pembelajaran PKn*. Tidak diterbitkan.
- Budimansyah, K.,Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Djamarah, S.B & Zain, A. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaelan.,Zubaedi, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Permana, D.S. (2010). *Implementasi Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Pengembangan Semangat Bela Negara Mahasiswa*. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Sapriya, (2013). *Proceeding Internasional Seminar "Developing citizen Characters in the Globalization Era: Prospect and Challenge"*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI.
- Somantri, M.N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Program Pascasarjana –UPI Bekerjasama dengan PT Remaja Rosdakarya.
- Suabuana, Cik. (2010). *Pengembangan Semangat Bela Negara Melalui Model Pembelajaran Project Citizent*. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Suseno, F.M. (2010). *Nasionalisme Indonesia, Apa Masa Depanmu?*. Jakarta: Menteri Sekretariat Negara. Diakses pada 23 September 2013, dari: <http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/jurnalnegarawan/jn17/17%20PART%207.pdf>.
- Tim Redaksi. (2010). *Penyalahgunaan Narkoba oleh Siswa*. {online}. Tersedia di <http://palembang.tribunnews.com/penyalahgunaan-narkoba-oleh-siswa/>. (04 Juni 2013).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahab, A.A. (2007). *Metode dan Model-Model Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A.A & Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2009). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.